

IMPLEMENTASI DIRECT AID PROGRAM (DAP) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI MALUKU

Ridho Cipta Saputra¹
Nim. 1002045217

Abstract

Generally people in rural areas are experiencing poverty due to lack of access to basic services and low human development indicators. Third, given the vastness and diversity of Indonesian territory, Regional differences are a fundamental feature of poverty in Indonesia. Through the DAP-assisted program in collaboration with YASTRA to target programs to match Government priorities and support communities to address poverty, The main focus of this program is Eastern Indonesia. Through one of the Yastra program that is community-based development in the form of making FADs to help the community in Sanahu Village El Paputih District West Seram District in making fishing rabbons for the community in Sanahu. With the increasing number of developed areas, the development of fisheries with the help of fishing equipment FADs can improve the welfare of coastal communities not only in Sanahu but all coastal areas in Maluku.

Keywords: *Direct Aid Program, YASTRA, poverty in Maluku*

Pendahuluan

Salah satu karekteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relative dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis. Dalam pengertian relative provinsi bagian timur menunjukkan nilai kemiskinan yang lebih tinggi.

Faktor penyebab lain yaitu, karena tingkat pendidikan orang tua yang rendah juga berdampak pada rendahnya penghasilan sehingga tidak dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Hal tersebut membuat anak-anaknya tidak dapat memperbaiki hidup mereka. Selain faktor internal faktor eksternal juga menjadi penyebab tingginya kemiskinan di Indonesia.

Faktor eksternal di antaranya adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran semakin meningkat, selain itu Kebijakan Pemerintah yang kurang tepat dan tidak berpihak Pemerintah terhadap masyarakat miskin juga menyebabkan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah masalah kesejahteraan yang tidak terpenuhi dan sangat tampak

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: bayu_1808@rocketmail.com

sampai ke daerah-daerah salah satunya adalah provinsi kepulauan di timur Indonesia, Maluku.

Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia bagian Timur yang mengalami perlambatan kemajuan Hal itu dikarenakan daerah ini sulit di jangkau dan biaya akses yang tidak murah.Maka dari itu banyak hal yang membuat daerah tersebut mengalami hambatan untuk maju dan berkembang.Sebagai daerah kepulauan Provinsi Maluku memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah.Potensi ini diharapkan dapat diberdayakan secara maksimal sehingga meningkatkan perekonomian wilayah.Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia memiliki beberapa program-program yang diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan.Permasalahan kemiskinan ini membuat beberapa negara atau lembaga ikut dalam menyelesaikan dan meringankan masalah tersebut.

Yayasan Sauwa Sejahtera (YASTRA) merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk atas dasar kepedulian social dan idealis mendalam dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan masyarakat miskin yang bermasalah di wilayah Maluku. Tujuan dari YASTRA adalah mengembangkan sumber daya manusia dan mencerdaskan bangsa, melestarikan lingkungan hidup dan budaya, serta mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sosial, ekonomi, dan budaya. Kedutaan besar Australia memiliki dana dukungan yang dikenal dengan nama Direct Aid Program (DAP), yang pengaturannya di bawah kebijakan Duta Besar Australia untuk Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang dirancang untuk membantu kelompok masyarakat guna meningkatkan standar kehidupan.DAP tersedia untuk kelompok masyarakat dan organisasi non pemerintah (LSM) yang terlibat dalam kegiatan pembangunan atas dasar non-provit dan memiliki daerah prioritas sejak tahun 2007.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah.Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.

Kemiskinan memiliki 4 bentuk, yaitu :

- 1) Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau 30 mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.
- 2) Kemiskinan Relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
- 3) Kemiskinan Kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
- 4) Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Secara umum kemiskinan yang terjadi di Indonesia di akibatkan oleh faktor-faktor kemiskinan Absolut dan Relatif sebagaimana terjadi pada berbagai kelompok masyarakat lainnya didunia.

Dalam hal ini untuk mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan tidak perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, garis kemiskinan relatif tidak dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan ke seluruh negara. Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yaitu :

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Malas Bekerja
Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
3. Keterbatasan Sumber Alam
Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
4. Terbatasnya Lapangan Kerja
Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
5. Keterbatasan Modal
Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
6. Beban Keluarga
Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Suryadiningrat dalam Dadan Hudyana (2009:30), juga mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya :

1. keengganan bekerja dan berusaha,
2. kebodohan,
3. motivasi rendah,
4. tidak memiliki rencana jangka panjang,
5. budaya kemiskinan, dan
6. pemahaman keliru terhadap kemiskinan.

Sedangkan penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidakmampuan seseorang bekerja dan berusaha akibat :

1. ketidakpedulian orang mampu kepada orang yang memerlukan atau orang tidak mampu.
2. kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin.

Kartasmita dalam Rahmawati (2006:4) mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu :

1. Rendahnya Taraf Pendidikan
Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
2. Rendahnya Derajat Kesehatan
Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
3. Terbatasnya Lapangan Kerja
Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
4. Kondisi Keterisolasian
Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Nasikun dalam Suryawati (2005:5) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu :

1. Pelestarian Proses Kemiskinan
Proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. Pola Produksi Kolonial
Negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Adanya unsur manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.

4. Kemiskinan Terjadi Karena Siklus Alam.
Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
5. Peminggiran Kaum Perempuan
Dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
6. Faktor Budaya dan Etnik
Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan seperti, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupaya untuk menjelaskan mengenai implementasi Direct Aid Program (DAP) dalam mengentaskan kemiskinan di Maluku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari buku, media massa, artikel, internet, dan sumber-sumber lainnya yang membahas permasalahan mendukung. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka (*library research*). Teknik analisis data yang telah digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yang menjelaskan dan menganalisis data dengan cara menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil diperlukan penulis, kemudian menyajikan hasil dari penelitian tersebut yaitu Direct Aid Program (DAP) dalam mengentaskan kemiskinan di Maluku.

Hasil Penelitian

Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan terus menjadi masalah sosial yang fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Dalam negara ini, nampaknya tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum kemiskinan di beberapa wilayah Indonesia disebabkan oleh kemiskinan Absolut dan kemiskinan relatif :

1. Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (poverty line) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya.
2. Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya.

Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis. Jika dalam pengertian absolut lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia yang hidup miskin berada di pulau Jawa (yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat), dalam pengertian relatif propinsi-propinsi di Indonesia Timur menunjukkan nilai kemiskinan yang lebih tinggi. Tabel di bawah ini menunjukkan lima propinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan relatif yang paling tinggi. Semua propinsi ini berlokasi di luar wilayah Indonesia Barat seperti pulau Jawa, Sumatra dan Bali (yang adalah wilayah-wilayah yang lebih berkembang dibanding pulau-pulau di bagian timur Indonesia).

Tingkat kemiskinan di propinsi-propinsi di Indonesia Timur ini, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani dan nelayan, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses perkembangan ekonomi dan jauh dari program-program pembangunan (yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga internasional). Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan dan - dengan demikian - menghindari kehidupan dalam kemiskinan. Bertentangan dengan angka kemiskinan relatif di Indonesia Timur, tabel di bawah ini menunjukkan angka kemiskinan absolut di Indonesia yang berkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatra. Kedua pulau ini adalah pulau terpadat (populasi) di Indonesia.

Proporsi penduduk miskin perkotaan di Papua dan Papua Barat lebih rendah dan di Maluku kurang lebih sama dengan nilai rata-rata nasional, namun di NTT proporsi penduduk miskin perkotaan justru lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Papua, Papua Barat, Maluku, dan Gorontalo memang merupakan provinsi tertinggi dalam kesenjangan proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan dipedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, keragaman proporsi kemiskinan pedesaan antar provinsi juga sangat besar, yaitu dari 4,65 sampai 41,58 persen. Proporsi tertinggi penduduk pedesaan yang hidup dibawah garis kemiskinan berada di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Gorontalo.

Umumnya masyarakat di daerah pedesaan mengalami kemiskinan karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi serta kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk, khususnya petani dan nelayan dalam skala kecil. Walaupun dengan adanya program-program bantuan sosial pemerintah seperti Raskin, Jamkesmas, BLT, dan ASKESKIN tidak berdampak besar karena ketergantungan kepada program tersebut tanpa adanya penghasilan yang pasti. Dari sekian program ini beberapa provinsi di Indonesia itu masih mengalami kemiskinan, sehingga berbagai kerjasama atau bantuan program dari Negara lain sangat diperlukan.

Direct Aid Program dan YASTRA

Kedutaan besar Australia memiliki dana dukungan yang dikenal dengan nama Direct Aid Program (DAP), yang pengaturannya di bawah kebijakan Duta Besar Australia untuk Indonesia. Tujuan utama DAP adalah untuk mengembangkan masyarakat yang dirancang untuk membantu kelompok masyarakat guna meningkatkan standar kehidupan mereka. DAP tersedia untuk kelompok masyarakat dan organisasi non pemerintah (LSM) yang terlibat dalam kegiatan pembangunan atas dasar nirlaba. DAP memiliki daerah prioritas sejak tahun 2007.

program hibah kecil yang didanai dari anggaran bantuan Australia. Ini memiliki fleksibilitas untuk bekerja dengan masyarakat lokal di negara-negara berkembang pada proyek-proyek yang mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan konsisten dengan kepentingan nasional Australia. Tujuan utama adalah untuk Pengembangan Masyarakat secara berkelanjutan yang dirancang untuk membantu kelompok masyarakat guna meningkatkan standar kehidupan mereka. DAP tersedia untuk kelompok masyarakat dan organisasi non pemerintah (LSM) yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Indonesia.

Proyek DAP mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, perlindungan lingkungan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, mendukung orang-orang cacat, mata pencaharian ekonomi, keamanan pangan dan hak asasi manusia. proyek DAP terlibat berbagai mitra termasuk kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, sekolah dan pemerintah daerah. Secara global DAP di jalankan di hampir semua benua seperti Afrika, Amerika, Asia, Pasifik, dan Eropa, dengan total 120 negara. Untuk Indonesia memiliki 3 wilayah yaitu Bali, Jakarta dan Makassar dalam pengajuan dana bantuan DAP untuk kelompok masyarakat dan organisasi non pemerintah (LSM) yang didanai oleh pemerintah dan kedutaan besar Australia. Untuk dana bantuan masyarakat yang berada di Maluku, dapat mengajukan permohonan melalui kedutaan besar Australia yang berada di Makassar dan untuk Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan permohonan melalui kedutaan besar Australia di Bali. Pada setiap masukan permohonan dana bantuan akan dipertimbangkan dan keputusan akhir tentang pendanaan oleh duta besar/komisaris tinggi.

Dalam memilih proyek yang akan didanai, komite DAP akan memastikan bahwa proyek memiliki hasil perkembangan, dan konsisten dengan kebijakan luar negeri dan perdagangan, dan tujuan diplomasi publik dari pos tersebut. Perhatian akan diberikan kepada proyek yang memberikan manfaat langsung bagi mereka yang paling membutuhkan di masyarakat setempat, termasuk kelompok rentan, kurang beruntung, wanita, anak-anak dan remaja. Proyek harus menangani isu gender dalam pelaksanaannya. Proyek DAP harus ditujukan terutama untuk mencapai hasil praktis dan nyata, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat; Sekolah/ pendidikan, Infrastruktur berskala kecil, Pembangunan pedesaan, Kesetaraan jender, manfaat lingkungan termasuk mengelola atau menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan bantuan kemanusiaan. Fokusnya harus pada kegiatan yang memiliki dampak langsung dan mungkin termasuk proyek pengembangan kapasitas, terutama di bidang pemerintahan dan keterlibatan hak asasi manusia.

Proyek DAP harus ditujukan terutama untuk mencapai hasil praktis dan nyata, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat; Sekolah/ pendidikan, Infrastruktur berskala kecil, Pembangunan pedesaan, Kesetaraan jender, manfaat lingkungan termasuk mengelola atau menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan bantuan kemanusiaan. Fokusnya harus pada kegiatan yang memiliki dampak langsung dan mungkin termasuk proyek pengembangan kapasitas, terutama di bidang pemerintahan dan keterlibatan hak asasi manusia. Proyek yang mendukung penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses kesempatan yang sama untuk partisipasi, kontribusi, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan sosial dan ekonomi seperti yang didorong oleh orang lain sangat dianjurkan.

Yayasan Sauwa Sejahtera disingkat YASTRA merupakan suatu lembaga Swadaya masyarakat yang dibentuk atas dasar kepedulian social dan idealis mendalam dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan masyarakat miskin yang bermasalah di Wilayah Maluku. Fokus utama program ini adalah Kawasan Timur Indonesia, DAP bekerja sama dengan YASTRA untuk menargetkan program agar sesuai Dengan prioritas pemerintah dan mendukung masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Pembuatan kebijakan Kami bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya untuk memberikan dampak kepada penduduk miskin di Maluku, sekaligus mendukung pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya Kebijakan, proses ekonomi dan demokrasi. Ini adalah cara yang relatif intensif terhadap sumber daya Memberikan pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan di Maluku

Kemiskinan di Maluku adalah kemiskinan relatif karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan pemerintah seperti akses pendidikan, kesehatan, serta transportasi sehingga mengalami perlambatan kemajuan yang tidak merata. Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku memiliki potensi wilayah yang berbeda. Potensi wilayah yang berbeda ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang berbeda pula. Ada daerah yang cepat

berkembang dan yang lambat berkembang. Perbedaan pertumbuhan ekonomi ini menciptakan kesenjangan ekonomi.

Maluku tengah memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dari tahun 2005 sampai 2014 walaupun mengalami penurunan tetapi masih dalam posisi tertinggi di antara kabupaten/kota yang berada di Maluku. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di Maluku secara keseluruhan menurun tetapi Rendahnya produktivitas, keterbatasan modal, serta rendahnya akses informasi dan akses pasar dalam memanfaatkan sumber daya alam menyebabkan masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Sumber daya alam harus optimal pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Maluku.

Karena penduduk Maluku tersebar di sejumlah besar pulau, menyebabkan terbatasnya pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang saat ini diterapkan belum sesuai dengan tujuan pembangunan provinsi. Khususnya pelabuhan laut dan bandara, dibutuhkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja produktif di Maluku. Frekuensi yang sedikit dan biaya transportasi yang tinggi merugikan pembangunan, mobilitas dan produktivitas tenaga kerja di Maluku, kesempatan kerja tidak selalu memberikan jalan untuk keluar dari kemiskinan. Diperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari rang-orang yang bekerja menemukan bahwa mereka berada dalam kemiskinan, dan sebagian besar dari mereka berada di daerah pedesaan. menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Maluku sebagian besar masih kurang diberdayakan. Para pemohon yang proyeknya telah disetujui akan diberitahukan melalui surat dan dana bantuan tersebut akan dikirimkan melalui bank. Para penerima dana ini harus mempunyai rekening bank yang menggunakan nama yayasan / organisasi / kelompok masyarakat. Penggunaan rekening atas nama pribadi tidak dapat diterima. Proses pertimbangan proposal biasanya memakan waktu paling sedikit dua bulan. Setelah proyek selesai dilaksanakan, pihak penerima bantuan harus mengirimkan laporan keuangan dan tanda terima asli atas pembelian barang-barang dan jasa kepada Konsulat-Jenderal Australia di Makassar. Dan melalui salah satu program Yastra yaitu pengembangan berbasis masyarakat berupa pembuatan rumpon untuk membantu masyarakat di Desa Sanahu Kecamatan El Papatih Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pembuatan rumpon penangkap ikan untuk masyarakat di Sanahu.

Implementasi Direct Aid Program (DAP) dalam mengentaskan kemiskinan di Maluku

Yastra memiliki beberapa program seperti bantuan pendidikan, kesehatan, transportasi dan konektivitas, perlindungan sosial, pengembangan berbasis masyarakat, beasiswa, air dan sanitasi. Namun yang terlaksana hanya 1 program yaitu pengembangan berbasis masyarakat. Untuk mengembangkan masyarakat dan meningkatkan standar hidup mereka. Pemerintah Australia melalui DAP bekerja sama dengan Yayasan Sauwa Sejahtera dalam upaya untuk membantu masyarakat pesisir yang berada di Pulau Seram bagian barat kecamatan teluk Elpapatih Dengan bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir (perikanan) melalui pemberian peralatan dasar alat tangkap tradisional (rumpon) di desa sanahu.

Komunitas nelayan pesisir di Desa Sanahu bersama Yastra bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia dalam upaya untuk membantu masyarakat pesisir yang berada di Desa Sanahu yang terletak di Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat. Kecamatan ini terdiri dari 7 desa, 4 dusun, dan 16 rukun tetangga (RT). Jumlah lingkungan terbanyak terdapat di Desa Sanahu. Desa Sanahu memiliki 2 dusun, dan 5 RT. Desa Sanahu merupakan desa kedua yang memiliki jumlah penduduk terbesar dengan persentase sebesar 18,27% dari penduduk Kecamatan Elpaputih. Sedangkan desa yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Desa Watui dengan persentase sebesar 0,6%.

Kemiskinan di Sanahu dominan dirasakan oleh masyarakat nelayan di wilayah barat. Keterbatasan akses menyebabkan masalah kemiskinan, kurangnya modal untuk melaut menyebabkan kemiskinan semakin susah untuk diatasi dikarenakan pendapatan yang tidak cukup sementara modal untuk melaut tidak kembali. Sehingga sangat diperlukan bantuan bagi masyarakat Sanahu.

Apabila nelayan tidak mendapatkan untung dari usaha melaut tersebut, maka akan sulit bagi nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Para nelayan tidak memiliki pilihan lain selain harus bertahan di pesisir karena mata pencaharian yang masih bergantung pada laut membuat para nelayan harus tetap bertahan dibandingkan pindah ke tempat lain. Apabila nelayan berpindah dari lokasi tempat tinggalnya saat ini, maka mata pencaharian mereka pun dapat terancam hilang.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Perikanan) Melalui Pemberian Peralatan Alat Tangkap Tradisional (Rumpon) di Desa Sanahu Yang diberikan kepada 6 Kelompok nelayan. Nelayan yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari 2 orang untuk masing-masing perahu penangkap ikan, 1 orang penunggu rumpon dan 5 orang yang mengoperasikan perahu penampung.

Fasilitas produksi yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi: rumpon, perahu penangkap ikan dan perahu penampung. Dalam satu unit usaha pancing ulur dengan rumpon ini, terdiri atas 6 unit rumpon, 6 unit kapal penangkap dan 1 kapal penampung. Kapal penangkap yang digunakan untuk operasi penangkapan ikan mempunyai ukuran 6,0 x 0,6 x 0,7 m. Untuk menggerakkan perahu tersebut dibutuhkan mesin perahu dengan kekuatan 5,5 PK. Sedangkan kapal penampung yang digunakan biasanya mempunyai panjang 21m, lebar 3 m dan tinggi 1,4 m. Mesin penggerak perahu penampung berkekuatan 90 PK. Pada operasi penangkapan yang dikombinasikan dengan rumpon. Kemiskinan di Sanahu dominan dirasakan oleh masyarakat nelayan di wilayah barat. Keterbatasan akses menyebabkan masalah kemiskinan, kurangnya modal untuk melaut menyebabkan kemiskinan semakin susah untuk diatasi dikarenakan pendapatan yang tidak cukup sementara modal untuk melaut tidak kembali. Sehingga sangat diperlukan bantuan bagi masyarakat Sanahu.

Penyebab kemiskinan nelayan di Desa Sanahu seperti status sebagai nelayan yang dinilai dari kalangan menengah kebawah, membuat akses terhadap beberapa fasilitas menjadi terbatas, salah satunya adalah fasilitas perbankan. Syarat yang sulit karena harus melampirkan sertifikat rumah, padahal tidak seluruh nelayan memiliki kondisi

rumah yang baik, serta tuntutan angsuran bulanan ke bank membuat nelayan berpikir dua kali untuk menggunakan fasilitas tersebut karena belum memiliki penghasilan yang pasti sehingga sulit bagi nelayan untuk mendapatkan kepercayaan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Perikanan) Melalui Pemberian Peralatan Alat Tangkap Tradisional (Rumpon) di Desa Sanahu Yang diperuntukkan kepada 6 Kelompok Nelayan. Nelayan yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari 2 orang untuk masing-masing perahu penangkap ikan, 1 orang penunggu rumpon dan 5 orang yang mengoperasikan perahu penampung.

Fasilitas produksi yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi: rumpon, perahu penangkap ikan dan perahu penampung. Dalam satu unit usaha pancing ulur dengan rumpon ini, terdiri atas 6 unit rumpon, 6 unit kapal penangkap dan 1 kapal penampung. Kapal penangkap yang digunakan untuk operasi penangkapan ikan mempunyai ukuran 6,0 x 0,6 x 0,7 m. Untuk menggerakkan perahu tersebut dibutuhkan mesin perahu dengan kekuatan 5,5 PK. Sedangkan kapal penampung yang digunakan biasanya mempunyai panjang 21m, lebar 3 m dan tinggi 1,4 m. Mesin penggerak perahu penampung berkekuatan 90 PK. Pada operasi penangkapan yang dikombinasikan dengan rumpon.

Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam satu unit usaha kegiatan ini adalah 16 orang. biasanya diambil dari anggota keluarga yang lain. Sedangkan penjaga rumpon, adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh kelompok untuk menjaga dan mencatat perahu-perahu yang melakukan penangkapan di rumpon. Lima orang yang mengoperasikan kapal penampung, pemasangan rumpon harus memperhatikan beberapa hal seperti Tidak mengganggu alur pelayaran, Jarak antar rumpon minimal 10 mil laut, Tidak dipasang dengan cara pemasangan yang mengakibatkan efek pagar (zig-zag).

Dengan ditentukan daerah penangkapan maka tujuan penangkapan oleh nelayan dapat menghemat bahan bakar, karena mereka tidak lagi mencari dan menangkap kelompok renang ikan dengan menyisir lautan yang luas yang tentunya akan menghabiskan biaya yang lebih besar. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan di Maluku, antara lain kapasitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, perijinan, system bagi hasil perikanan, IUU, dan lain-lain. Wilayah laut yang luas di Maluku berpeluang untuk dikembangkannya sektor perikanan. Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan masih sangat rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Hasil perikanan di Maluku lebih banyak diolah di luar Maluku sebagai Barang jadi karena belum tersedianya pabrik pengolahan ikan untuk mengolah ikan menjadi memiliki nilai tambah yang dapat dijual dengan harga tinggi.

Sebagai hambatan wilayah kepulauan yang sebagian terdiri dari lautan sehingga untuk sarana dan prasarana transportasi belum mendapat perhatian. karena sektor angkutan darat ini cukup bermanfaat bagi wilayah-wilayah yang tidak dipisahkan oleh laut atau satu pulau dan bahkan antar pulau yang letak pulauanya cukup dekat satu dengan lainnya (Ambon – Seram). Sarana dan 140 prasarana transportasi di wilayah kepulauan Provinsi Maluku meliputi transportasi darat, udara dan air (laut).

Sarana dan prasarana transportasi udara di wilayah kepulauan Provinsi Maluku membagikan beberapa kelas untuk kapasitas lapangan udara yang di Maluku. Kota Ambon sebagai pusat pertumbuhan/pengembangan memiliki bandar udara tipe kls 1 dan Kabupaten Maluku Tengah Kls 3 sedangkan kabupaten lainnya hanya memiliki bandar udara bertipe Lapter (lapangan terbang). Dengan kondisi bandar udara seperti di atas maka masih sulit untuk pusat-pusat pengembangan di wilayah ini dapat mempercepat pengembangan wilayah dengan keunggulan sektoralnya.

Hambatan lainnya juga ada pada pengajuan proposal proyek, dimana untuk wilayah Maluku jika ingin mengajukan permintaan dana bantuan harus melalui Kedutaan besar Australia yang berada di Makassar, khususnya di Pulau Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara. Para pemohon dana bantuan harus mengetahui bahwa pihak Konsulat-Jenderal tidak dapat memberikan bantuan pada seluruh proposal yang diterima. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dana DAP dan proses pertimbangan proposal biasanya memakan waktu paling sedikit dua bulan. Setelah proyek selesai dilaksanakan, pihak penerima bantuan harus mengirimkan laporan keuangan dan tanda terima asli atas pembelian barang-barang dan jasa kepada Konsulat-Jenderal Australia di Makassar.

Kesimpulan

Kerjasama Indonesia dengan AUSAID terjalin dalam berbagai bidang baik dalam bidang ekonomi maupun bidang sosial. Hubungan kerjasama ini mampu menghasilkan perubahan di Indonesia yaitu mampu membantu lembaga pemerintah dalam menurunkan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya bantuan berupa kebijakan ekonomi untuk pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan memperkuat kapasitas analisis ekonomi Indonesia. Meskipun sulit untuk dipungkiri bahwa Indonesia masih memerlukan bantuan pihak asing dalam pembangunan berkelanjutan. Setelah ditinjau dari pencapaian tujuan dari kerjasama yang dilaksanakan AUSAID pada program DAP dengan Indonesia yaitu secara khusus bekerjasama dengan YASTRA dalam membantu menangani permasalahan kemiskinan melalui bantuan pembuatan alat tangkap rumpon untuk masyarakat Sanahu dinilai cukup, dengan kata lain bahwa masih banyak kekurangan yang harus dibenahi salah satunya seperti akses di setiap wilayah di daerah yang susah dijangkau untuk memberikan kemudahan dalam memberikan bantuan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan semua pihak baik instansi pemerintah yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dalam membantu dan mengawasi bagaimana realisasi kerjasama ini secara maksimal program kerja dari bantuan kerjasama ini dapat memberikan penilaian objektif.

Saran

Kemiskinan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan setiap negara, karena kemiskinan merupakan masalah sosial yang dapat menghambat pembangunan dan kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Maka penulis ingin menuangkan saran bagi pemerintah maupun lembaga lain dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

1. Pemerintah Indonesia seharusnya ikut berperan aktif dalam menjalin kerjasama luar negeri dan memberikan jaminan keamanan dan kemudahan dalam bekerjasama.

2. Pemerintah daerah dan instansi terkait lebih terlibat dalam proses pembangunan dalam bidang sosial khususnya masalah kemiskinan di Maluku.
3. pengembangan wilayah dengan mempercepat pengembangan akses transportasi disetiap wilayah Maluku yang sulit dijangkau.

Daftar Pustaka

Direct Aid Program Annual Overview 2015-16 dalam:

<http://dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/Pages/direct-aid-program-annual-overview-2015-16.aspx> diakses pada tanggal 07 juni 2017 Annual overview 2015-16 South East Asia dalam:

<http://dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/Pages/annual-overview-2015-16-south-east-asia.aspx> diakses pada tanggal 07 juni 2017

Badan Pusat Statistik persentase berdasarkan total penduduk per propinsi bulan September 2014. diakses pada tanggal 20 september 2016

Dap general guidelines dalam:

<http://dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/Pages/dap-general-guidelines.aspx> diakses pada tanggal 19 februari 2017

Direct Aid Program di Indonesia Dalam: <https://triple-funds.com/tf-entry/direct-aid-program-for-indonesia/> diakses padatanggal 17 maret 2017

Direct Aid Program dalam: <http://dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/Pages/direct-aid-program.aspx> diakses padatanggal 17 maret 2017

Harmadi Harry B sonny, “ Tantangan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”, Mini Economica, Edisi 42, 2013. Hal 168

Hendra Roy. Determinan kemiskinan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010. Hal 26

Ibid Di akses pada tanggal 15 juni 2017

Jurnal agrikultura 2009, 209(3): 176-184 strategi pengentasan kemiskinan di pulau kecil provinsi maluku, Wardis Girsang

kelaparan-dan-kemiskinan-masih-menghantui-400-juta-anak-di-dunia, dalam:<http://finance.detik.com/read/2013/10/13/150502/2385634/4/> Di akses pada tanggal 15 juni 2017

Kemiskinan di Indonesia dalam: <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301> diakses pada tanggal 20 september 2016

- Kemiskinan di Maluku dan Maluku Utara dalam:
<https://id.scribd.com/doc/305649992/Kemiskinan-di-Maluku-dan-Maluku-Utara> diakses pada tanggal 19 februari 2017
- Latifah Emmy, Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang Berorientasi pada Millenium Development Goals, jurnal dinamika hukum, Vol 1 No.3, 2008. Hal 407
- (Strategi Bagi Birokrasi Sebagai Ujung Tombak Implementasi 8 sasaran MDGs)
Model Impelementasi Program dalam Upaya Pencapaian Sasaran MDGs 2015, dalam :www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosidings2/fisip201206.pdf di akses pada 10 april 2017
- Menurut FAO, proporsi penduduk yang mengkonsumsi kurang dari standar asupan nasional dan aksesnya, dalam:
<http://www.fao.org/DOCREP/005/y4249e/y4249e06.html>, Di akses pada 13 juni 2017.
- Model Impelementasi Program dalam Upaya Pencapaian Sasaran MDGs 2015 (Strategi Bagi Birokrasi Sebagai Ujung Tombak Implementasi 8 sasaran MDGs), dalam :www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosidings2/fisip201206.pdf di akses pada 15 juni 2017
- Nurfadilah. Eektivitas Kerjasama Indonesia - USAID Dalam Penanganan Kemiskinan Untuk Mencapai MDGS 2015.Samarinda : program studi hubungan international universitas Mulawarman Kalimantan Timur2014
- Parsudi Suparlan Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan, Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia, 1984,
- PDA Ambon Elson dalam:
<http://www.australiaawardsindonesia.org/files/alumni/PDAslides/PDA.Ambon-Elson> diakses pada tanggal 19 februari 2017
- Pelatihan pembuatan rumpon
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JITPT/article/download/8333/7895>
diakses pada tanggal 11 agustus 2017
- perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/...Konten...Konten%20D546.pdf
pusat data statistic dan informasi-kementrian kelautan dan perikanan diakses pada tanggal 10 mei 2017
- Pendataan rumah tangga miskin di wilayah pesisir/nelayan
<http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/35.%2001032011%20PA-PARAN%20rumah%20tangga%20pesisir.pdf> diakses pada tanggal 09 mei 2017

repository.ipb.ac.id/. BAB V Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku.pdf diakses pada tanggal 20 juni 2017

SUSENAS, BPS Provinsi Maluku diakses pada tanggal 10 mei 2017

Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Maluku 2015 diakses pada tanggal 6 maret 2017

Suryawati, C. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. <http://www.jmpk-online.net> diakses pada tanggal 10 mei 2017

Tidak Efektif, KPK Minta Program Raskin Didesain Ulang <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781-tidak-efektif-kpk-minta-program-Raskin-didesain-ulang> diakses pada tanggal 19 februari 2017

Yastra bantuan melalui-alat-tangkap-rumpon [https:// id1742020.panpages.co.id/](https://id1742020.panpages.co.id/) diakses pada tanggal 22 agustus 2017